ANALISIS KESALAHAN TATA KELOLA RUPBASAN

Vincentius Andhika Wijaya

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
email: vincent.wijayaaa21@gmail.com

Abstract

Rupbasan's optimal governance will result in contributions in law enforcement efforts. The duties and functions of Rupbasan are as storage and maintenance and are physically responsible for state confiscated goods. Law number 8 of 1981 article 44 states that state confiscated objects are stored in the State Confiscated Objects Storage House and the responsible are authorized officials. There are several problems that occur in the management system of buses and goods in Rupbasan This problem is divided into 2, namely, internal and external problems. The internal problem is the inadequate office buildings, warehouses and employees of Rupbasan. While the external problem is the implementation of untimely execution that results in a drastic shrinking of the economic value of buses and goods in Rupbasan. The purpose and function of this study is to provide input to policy makers related to regulations related to the duties and functions of Rupbasan. The method used in this study is a method of juridical analysis with a literary approach. The findings of the research on the lack of facilities in Rupbasan as well as the authority of Rupbasan in the criminal justice system in managing state confiscated goods and bureaucracy that must be updated in the criminal justice system process.

Keywords: *rupbasan; staffing; warehouse; basan; goods*

Abstrak

Tata kelola Rupbasan secara optimal akan menghasilkan kontribusi dalam upaya penegakan hukum. Tugas dan fungsi Rupbasan adalah sebagai penyimpanan dan perawatan serta bertanggung jawab secara fisik terhadap barang sitaan negara. Undang undang nomor 8 tahun 1981 pasal 44 menyatakan bahwa benda sitaan negara disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan yang bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam tata pengelolaan basan dan barang yang ada di Rupbasan Permasalahan ini terbagi 2 yaitu, permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai Rupbasan. Sedangkan permasalahan eksternal yaitu pelaksana eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya secara

drastis nilai ekonomi basan dan barang di Rupbasan. Tujuan dan fungsi dari penelitian ini untuk memberi masukan terhadap pengambil kebijakan terkait peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rupbasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis yuridis dengan pendekatan literatur. Temuan hasil penelitian kurangnya fasilitas yang ada dalam Rupbasan serta kewenangan Rupbasan dalam sistem peradilan pidana dalam mengelola barang sitaan negara dan birokrasi yang harus diperbaharui dalam proses sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: rupbasan; pegawai; gudang; basan; barang

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum (Febriansyah, 2016; Hidayat, 2016). Indonesia yang menganut dasar negara yaitu Pancasila mempunyai maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan itu merupakan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera dan seluruh masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang akan membuat keseimbangan ditengah masyarakat. Konsep dari negara hukum yaitu didirikan dengan asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam butir-butir pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Penyelewengan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akan berurusan dengan hukum. Tindakan yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan didalam hukum yang didasarkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang – wenang terhadap rakyatnya. Komponen sistem peradilan pidana akan dilaksanakan ketika masyarakat berurusan dengan hukum. Seseorang yang melanggar hukum akan tahan dan disidangkan di Pengadilan yang akan di putus hukumannya. Disini peran Rupbasan muncul sebagai penyimpan bukti sitaan negara dari seseorang yang berkonflik dengan hukum.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Rupbasan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap semua benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Manting & Sudarwanto, 2019).

Tugas pokok Rupbasan adalah melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud dan dikelola

berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik (Jenderal, 2016).

Tata pengelolaan Rupbasan bukan hanya tentang cara bagaimana merawat barang dan penyimpanan barang, akan tetapi perlu diperhatikan juga bagian fasilitatif serta apa tindakan yang konkret untuk memperbaiki permasalahan yang ada dilingkungan sekitar untuk mendukung tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan good governance. Ada 2 faktor yang menjadi kendala dalam tata pengelolaan Rupbasan yaitu, bagian internal dan eksternal.

Bagian internal merupakan sarana dan prasarana seperti gedung perkantoran dan gudang tempat penyimpanan barang sitaan negara serta sumber daya manusia yaitu pegawai sendiri. Jika dilihat dari tempat secara visual, ada banyak Rupbasan di Indonesia yang kurang layak. Contohnya seperti banyak gudang yang terbungkalai dan tidak kelola dengan baik, tidak menjaga kebersihan didaerah gudang serta kurangnya perawatan dari pegawai terhadap basan dan barang sehingga membuat barang sitaan negara menjadi tidak terawat dan seperti tumpukan atau ronsokan sampah.

Kinerja dari pegawai menjadi tolak ukur untuk memberikan pelayanan. Peran pegawai dalam mengelola Rupbasan menjadi salah satu aspek agar Rupbasan dapat menuju perubahan yang semakin baik. Pengetahuan dan keterampilan dari antar pegawai sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia yang sangat minim yang membuat Rupbasan tidak dikelola secara efektif dan efisien. Hasil akhirnya yang akan membuat Rupbasan dipandang organisasi yang kurang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat diperbaiki dan dievaluasi dengan baik agar memungkinkan Rupbasan dapat mencapai eksistensinya dalam sistem peradilan pidana.

Upaya pencapaian keunggulan bersaing yang berkelanjutan dilihat sebagai jalan keluar dari pilihan manajerial yang bersifat diskresi dan akumulasi sumber daya yang bersifat strategis serta pendayagunaan sumber daya tersebut, dimana hal ini semua tergantung pada hasil akhir dan penggunaan sistem informasi manajemen yang telah didesain secara efektif. Sebaliknya, sudut pandang deskriptif mengenai strategi adalah peranan untuk melakukan interaksi antara manajemen, pegawai dan lingkungan dimana proses strategis yang ada dianggap bersifat kompleks dan eksis dalam keadaan tidak stabil yang bersifat berkelanjutan dengan konsekuensi yang kadangkala muncul dari tujuan yang telah direncanakan dari awal. Strategi dianggap sebagai pandangan yang didasarkan secara organisatoris, dengan pengambilan keputusan serta implementasinya yang bersifat kompleks, dinamis dan memiliki beragam sisi (Meutia, 2017).

Dari pernyataan Kathrin Connor, diakui bahwa sumber daya manusia merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijaksanaan organisasi, perencanaan perluasan lini organisasi, proses merger dan akuisisi organisasi. Hanya sebagian kecil saja hal-hal yang dilakukan organisasi tanpa melibatkan sumber daya manusia dalam membuat perencanaan, kebijaksanaan, dan pembentukan strategi organisasi. Apabila organisasi melakukan perencanaan strategis manajer lini lebih berkemungkinan melihat sifat-sifat penting isu-isu SDM yang ada (Ellitan, 2002).

Menurunnya secara drastis nilai ekonomis barang dan basan yang ada di Rupbasan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara. Eksekusi yang sangat lama menimbulkan kerusakan banyak pada basan dan barang tersebut. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 pasal 38 menyatakan bahwa Rupbasan tidak berhak untuk melakukan pelelangan barang, akan tetapi Rupbasan dapat merekomendasi kepada siapa dilakukan pelelangan, antara penuntut umum atau penyidik. Koordinasi antara Rupbasan dengan Kepolisian, Jaksa dan Hakim terkait masalah pelelangan harus diperbaiki agar dilakukan pelelangan secepatnya sehingga tidak menurunnya secara drastis nilai ekonomis dari barang dan basan yang disimpan di Rupbasan.

Pada situasi ini, banyaknya kendala membuat organisasi kurang maju hingga terhambatnya proses pelaksanaan hukum acara pidana. Hal ini menjadi perhatian untuk atasan atau pejabat yang berwenang serta peran stakeholder dalam mengelola Rupbasan agar sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan..

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis yuridis dengan pendekatan literatur dengan dasar hukum yang sesuai dengan sasaran yang berguna untuk perkembangan dan eksistensi Rupbasan terkhusus pada pengelolaan dan menjelaskan serta memberikan solusi atas objek permasalahan untuk mencapai tujuan dari Rupbasan. Dengan pengelolaan yang baik dan perencanaan yang strategis akan memungkinkan Rupbasan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Data primer yang diambil berasal dari penelitian langsung dengan cara observasi visual untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian dan data sekunder diambil dari kepustakaan (referensi) yang dikaitkan dengan hukum yang berlaku guna untuk mendukung berjalannya sistem pengelolaan di Rupbasan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari penelitian langsung secara observasi visual di Rupbasan Jakarta Selatan. Menurut Kepala Rupbasan Klas I Jakarta Selatan Viverdi Anggoro.,M.Si menyatakan bahwa Rupbasan Klas 1 Jakarta Selatan berdiri pada tahun 2000 dan menempati gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada tahun 2004 berpindah lokasi di jalan Trunojoyo ex. Gedung Walikota Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2007, sesuai dengan instruksi Walikota Jakarta Selatan bahwa gedung yang ditempati Rupbasan Klas I Jakarta Selatan akan direlokasi sehingga Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Selatan berupaya untuk mencari dan mengajukan permohonan pengadaan gedung dan lahan melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM. Atas pengajuan tersebut, Sekretariat Jendral menanggapi permasalahan ini sangat serius dan kemudian Rupbasan Klas I Jakarta Selatan mendapatkan anggaran untuk sewa gedung dan kantor sebesar Rp. 240.000.000 (termasuk pajak). Dan pada 2008, Rupbasan Klas I Jakarta Selatan akhirnya dapat menyewa rumah/bangunan hingga saat ini. Kendala berikutnya adalah kurangnya pengadaan gudang untuk menyimpan barang sitaan negara. Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan hanya memiliki 3 gudang yaitu gudang terbuka, gudang tertutup dan gudang berharga.

Unit Pelaksanaan Teknis Rupbasan di Indonesia hanya terdapat di beberapa daerah pada saat ini, seperti yang terlihat pada keterangan berikut:

Tabel 1.

Unit Pelaksanaan Teknis Rupbasan

Rupbasan Klas I		Rupbasan Klas II	
No	Lokasi	No	Lokasi
1	Banda Aceh	1	Bangkinang
2	Medan	2	Bengkalis
3	Padang	3	Rengat
4	Pekan Baru	4	Tanjung Pinang
5	Jambi	5	Batu Raja
6	Palembang	6	Pangkal Pinang
7	Lampung	7	Metro
8	Bengkulu	8	Kota Bumi
9	Jakarta Barat	9	Arga Makmur
10	Jakarta Selatan	10	Serang
11	Jakarta Timur	11	Indramayu
12	Jakarta Utara	12	Wonosari
13	Jakarta Pusat	13	Wates
14	Bandung	14	Bantul
15	Cirebon	15	Wonogiri

16	Yogyakarta	16	Cilacap
17	Semarang	17	Purbalingga
18	Surakarta	18	Purwokerto
19	Pekalongan	19	Sragen
20	Surabaya	20	Blitar
21	Probolinggo	21	Jombang
22	Pasuruan	22	Mojokerto
23	Pontianak	23	Sanggau
24	Singkawang	24	Sumbawa Besar
25	Palangkaraya	25	Ternate
26	Banjarmasin	26	Manokwari
27	Samarinda		
28	Manado		
29	Gorontalo		
30	Palu		
31	Makassar		
32	Kendari		
33	Denpasar		
34	Mataram		
35	Kupang		
36	Ambon		
37	Jayapura		

Data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan ini menyatakan bahwa Rupbasan belum terbentuk disetiap kabupaten/kota, terdapat 63 operasional dari 211 unit sehingga belum terbentuk 148 unit (hampir 30 tahun), dan dari 63 operasional tersebut ada 27 operasional yang lahannya milik sendiri, seharusnya mengikuti jumlah kabupaten/kota Se-Indonesia yaitu kurang lebih 530 (Manting & Sudarwanto, 2019). Berikut adalah status kepemilikan Rupbasan di seluruh Indonesia :

Tabel 2.

Status kepemilikan Rupbasan di Indonesia

Milik Sendiri	27
Hak Pakai	3
Milik Kanwil	8
Ex Lembaga Pemasyarakatan	2
Ex Rumah Dinas	2
Hibah Pemerintah	1
Ngontrak Rumah	1
Hibah Hak Pakai	1
Numpang di Rutan	1
Ngontrak	1
Ex Puskesmas Pemda	1

Hak Pakai Tanah Negara	1
Milik Lapas	5
Ex Bapas	1
Hak Guna Pakai Lp	1
Ex Gedung Agraria	1
Milik Rutan	1
Milik Pemda	1
Aula Kanwil	1
Ex Lp	1
Ex Gedung BPP	2

Dari 63 Rupbasan yang ada, belum ada satupun Rupbasan yang memenuhi standar ideal sebagai suatu Rupbasan yang semestinya memiliki 5 (lima) jenis gudang yang berbeda seperti gudang umum tertutup, gudang umum terbuka, gudang berharga, gudang berbahaya dan kandang untuk hewan dan tumbuhan serta sarana utilitas dan prasarana lingkungan (Manting & Sudarwanto, 2019).

Kemudian ada juga provinsi yang belum terbentuk Rupbasan, yaitu provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengakibatkan kurangnya operasional yang berada disetiap daerah dan menjadi terhambat dalam pelaksana hukum acara pidana. Perencanaan yang tidak efektif dari pimpinan membuat Pemasarakatan menjadi terbengkalai dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah organisasi harus memiliki rencana strategis yang membuat organisasi semakin berkembang dengan pesat serta dapat mencapai tujuan organisasi terkhusus untuk lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 menyatakan bahwa gudang yang ada di Rupbasan memiliki 5 (lima) Jenis yaitu basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum; basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga; basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya; basan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan basan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan (Pemasarakatan, 2002). Berikut data Rupbasan di Indonesia yang memiliki gudang dalam menyimpan barang dan basan :

Tabel 3.
Gudang Rupbasan di Indonesia

Kepemilikan Gudang	Jumlah
Jumlah Rupbasan Memiliki 5 Gudang	-
Jumlah Rupbasan Memiliki 4 Gudang	19 Unit
Jumlah Rupbasan Memiliki 3 Gudang	21 Unit
Jumlah Rupbasan Memiliki 2 Gudang	17 Unit
Jumlah Rupbasan Memiliki 1 Gudang	4 Unit

Jumlah Rupbasan Tidak Memiliki Gudang	2 Unit
Jumlah	63 Unit

Berdasarkan data yang di dapat belum semua Rupbasan memiliki satandart jumlah gudang yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014. Sebagian besar Rupbasan hanya memiliki 3 (tiga) dan 4 (empat) bahkan ada yang tidak memiliki gudang sama sekali.

Pemenuhan terhadap sarana dan prasana penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Ketika sarana dan prasarana tidak terpenuhi, kinerja pegawai akan menurun. Sehingga tidak berjalannya sistem Rupbasan dengan baik. Kemudian kualitas dan kuantitas pegawai seharusnya diperhatikan untuk menjadi sumber keunggulan daya saing dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang sangat minim akan menimbulkan dampak yang besar terhadap Rupbasan. Dampak yang terjadi memungkinkan organisasi tidak berkembang dan tidak dapat bersaing dengan organisasi yang lain serta kurangnya peran Rupbasan dalam sistem peradilan pidana.

Barang sitaan negara yang ada dalam ketentuan acara pidana untuk keperluan proses peradilan sebagai bukti dari tindak pidana seseorang. Rupbasan yang diwenangkan untuk menyimpan barang bukti bertugas untuk mengelola dan merawat barang tersebut. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang diberikan wewenang, Rupbasan akan bertanggung jawab atas kondisi fisik dan secara administrasi terhadap benda dan barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga keutuhan dari benda dan barang tersebut. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan yang baik dari Rupbasan. Selain itu, aspek – aspek pendukung dari fasilitatif harus terpenuhi dari gedung, gudang serta pegawai yang bertugas.

Kendala yang ada saat ini adalah keberadaan Rupbasan di Indonesia yang sangat minim dan hanya terdapat didaerah tertentu. Hal ini membuat sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik dan menjadi permasalahan yang vital dari sistem peradilan pidana. Permasalahan krusial ini disebabkan oleh pengelolaan Rupbasan yang sangat kurang dalam mengelola suatu organisasi. Dilihat dari kondisi keberadaan Rupbasan, dapat dikatakan masih sangat jauh dari ideal karena kendala atau hambatan – hambatan yang berpuluh – puluhan tahun ditimbun bahkan kendala ini sejak adanya Rupbasan (Manting & Sudarwanto, 2019).

Minimnya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Rupbasan; Sarana dan prasarana yang begitu vital dalam proses penerimaan, penelitian, penilaian sampai kepada proses penempatan, pengamanan dan pemeliharaan termasuk ketersediaan gedung dan atau gudang sangat terbatas sehingga tidak memenuhi standart ideal. Anggaran yang masih sangat minim untuk mendukung

peningkatan kinerja Rupbasan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembenahan Rupbasan

Jumlah kabupaten/kota diseluruh Indonesia mencapai 530 kabupaten/kota, sedangkan jumlah Rupbasan hanya ada 63 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia. Belum terbentuknya Rupbasan disetiap kabupaten/kota akan menghambat proses sistem peradilan pidana disetiap wilayah. Dalam proses peradilan pidana, Rupbasan memiliki stigma dari Kejaksaan, Kepolisian dan pengadilan dalam mengelola barang dan basan. Instansi ini menganggap bahwa Rupbasan belum mampu untuk mengelola barang dan basan sehingga sering sekali basan dan barang ditempatkan di Kepolisian dan tidak diberikan kepada Rupbasan ditambah dengan Rupbasan yang minim dengan fasilitas termasuk gudang tempat penyimpanan basan dan barnag. Tidak secara langsung ini akan menjadi ancaman terhadap Rupbasan dalam proses sistem peradilan pidana.

Gudang juga menjadi kendala dalam pengelolaan Rupbasan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2014 menyatakan bahwa Rupbasan yang ideal memiliki 5 (lima) gudang sebagai tempat penyimpanan basan dan barang. Dari data yang diambil menyatakan bahwa tidak ada Rupbasan yang memiliki 5 (lima) gudang bahkan terdapat 2 (dua) Rupbasan yang tidak memiliki gudang. Peran stakeholder dalam memenuhi sarana dan prasarana yang ada di Rupbasan sangat minim. Ketersediaan sarana dan prasarana harus dipenuhi agar kinerja pegawai dapat meningkat dan kemudian dapat mencapai tujuan dari Rupbasan.

Pemerintah harus memperbaikinya sedikit demi sedikit, mungkin Pemerintah mulai dari mengganti gedung yang ditempati Rupbasan dengan lahan milik sendiri dan memiliki gedung sendiri. Ketika Rupbasan memiliki gedung dan lahan sendiri, pihak Rupbasan dapat mengelola Rupbasan dengan baik, seperti merenovasi dan menambah fasilitas didalam Rupbasan terkhusus untuk gudang sebagai sarana penyimpanan benda sitaan negara. Ketika gudang sudah terpenuhi, penempatan basan dan barang dapat dimaksimalkan dengan baik. Gudang merupakan salah satu sarana dan prasana yang sangat menunjang kinerja pegawai dalam bekerja. Sarana dan prasarana yang terpenuhi akan menambah motivasi kinerja pegawai. Pegawai akan lebih bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Akan tetapi kualitas yang dimiliki pegawai sangat minim. Penguasaan dalam bekerja yang sangat kurang, menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi. Menambah sumber daya manusia adalah hal yang tepat dan harus dilakukan untuk menutupi kekurangan – kekurangan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis.

Kurangnya sumber daya manusia memberikan permasalahan yang vital untuk suatu organisasi. Tugas dan fungsi Rupbasan adalah merawat dan menyimpan basan dan barang agar barang yang dititipkan tetap dengan

keadaan yang baik. Dalam proses penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara, pegawai sangat berperan penting karena mempunyai peran sebagai pelaksana yang bertugas untuk memeriksa, meneliti dan mengidentifikasi basan dan barang. Bahwa seorang pegawai dituntut untuk mempunyai kemampuan kerja sesuai dengan bidang kerjanya, setidaknya para pegawai mengetahui tehnik – tehnik penyimpanan dan pemeliharaan. karena itu setiap organisasi dituntut lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas anggotanya dan menstimulasi mereka agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing (Anita et al., 2013; Hardono et al., 2019).

Kritisnya peran sumber daya manusia tidak disertai dengan sifat kepastian tenaga kerja. Justru sebaliknya terdapat peningkatan ketidakpastian tenaga kerja yang dihadapi organisasi. Organisasi tidak dapat menentukan secara pasti hal-hal yang berkenaan dengan supply tenaga kerja antara lain yaitu bagaimana menarik, mempertahankan, dan memotifasi sumber daya manusia yang semakin beragam dan bagaimana cara mendapatkan individu yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang tepat. Akhirnya bagaimana mengarahkan sumber daya manusia yang ada agar dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif (Ellitan, 2002). Organisasi sangat membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih untuk mengelola Rupbasan dengan baik dan benar. Akan tetapi petugas sangat terbatas baik secara kemampuan dan kualitas.

Yang harus diperbaiki adalah perekrutan pegawai untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkhusus untuk Rupbasan. Pegawai yang memiliki keunggulan dan berkopeten serta disiplin dalam bekerja akan direkrut menjadi pegawai Rupbasan. Kualitas dan kuantitas harus dimiliki pegawai agar dapat bersaing dengan pegawai instansi lain. Seperti halnya Kepolisian, mereka yang direkrut menjadi seorang Polisi akan diseleksi dengan ketat dan mendapat pendidikan mulai dari 1 (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun untuk menjadi seorang perwira.

Kepolisian menjadi salah satu contoh untuk merekrut pegawai yang berkopeten. Demikian juga dengan pegawai yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dalam hal merekrut pegawai. Pendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus melewati beberapa seleksi yang ketat, mulai dari seleksi berkas yang harus dipenuhi, pengetahuan yang mereka miliki, kemudian fisik yang memenuhi, berwawasan yang tinggi dan sehat jasmani serta rohani. Mereka yang sudah lulus seleksi, akan diberikan pembekalan bekerja. Pembekalan kerja akan dilakukan sekitar 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan agar mereka matang dalam bekerja. Kematangan dalam bekerja yang sangat diperlukan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada saat ini yang terjadi untuk pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dilakukan

1 (satu) bulan kemudian langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis. Pembekalan yang kurang matang membuat mereka harus banyak belajar dan kurang mengerti akan tugas dan fungsi mereka sebagai pegawai.

Sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik akan melahirkan pegawai yang memiliki jiwa profesional, akuntabel, sinergi, dan memiliki inovasi – inovasi yang berguna untuk mendukung berjalannya suatu organisasi. Cara berfikir yang matang serta bekerja secara profesional membawa dampak yang positif bagi kemajuan organisasi.

Diketahui bahwa tujuan dari Rupbasan adalah memelihara, mengelola dan menjaga nilai barang dan basan yang ada di Rupbasan. Untuk menjaga nilai barang dan basan tersebut dengan cara melakukan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai. Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan yang terdiri dari pegawai – pegawai yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi barang dan basan. Tim penilai ini bertugas untuk menentukan dan memilih basan dan barang yang memiliki mutu dan bersertifikat.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, Rupbasan telah dibuat Peraturan bersama sistem pengelolaan barang sitaan negara yang telah disepakati oleh Kepolisian, KPK, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan. Rupbasan juga harus melakukan koordinasi antar penegak hukum untuk kejelasan dari tugas dan fungsi Rupbasan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan penelitian dari Rupbasan Klas I Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Rupbasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola barang dan basan yang ada di Rupbasan, Rupbasan hanya dapat tugas untuk perlindungan kewenangan fisik. Rupbasan tidak dapat melakukan tindakan yang lebih lanjut dari barang dan basan yang ada di Rupbasan sendiri. Salinan pengadilan dari Rupbasan tidak selalu diberikan kepada Rupbasan, sehingga Rupbasan sangat sulit untuk melacak dokumen putusan pengadilan. Dokumen putusan pengadilan berisi tentang keberadaan basan dan barang ditempatkan. Dalam kondisi ini Rupbasan kesulitan dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan. Kewenangan dari Rupbasan sangat terbatas.

Solusi yang dapat dilakukan adalah merubah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 yang berisi tentang petikan putusan perkara hanya diberikan kepada terdakwa, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Penuntut Umum. Dalam hal ini Rupbasan tidak mendapat petikan putusan perkara, seharusnya perbaikan birokrasi kepada Rupbasan dengan menambahkan sebagai salah satu penerima petikan putusan pengadilan tersebut. Dengan begitu Rupbasan dapat mengelola dan mengetahui keberadaan barang dan basan. Rupbasan tidak dapat untuk melakukan pemutasian terhadap barang dan basan jika peraturan tersebut tidak diubah. Hal ini yang mengakibatkan penumpukan barang di Rupbasan

dan pihak Rupbasan tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan sehingga dilakukan pembiaran terhadap barang dan basan dikarenakan anggaran perawatan yang minim dan semakin lama nilai ekonomis barang dan basan semakin menyusut.

Menganalisa beberapa kondisi nyata di atas bahwa kemampuan Negara untuk merawat Basan sangat terbatas. Akibatnya, barang-barang tersebut bisa rusak dan nilainya jauh menurun sebelum proses hukum selesai atau in kracht (Sadarisman et al., 2018).

Kesimpulan

Tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah menyimpan benda sitaan negara serta merawat secara fisik benda sitaan negara tersebut. Keamanan dan keselamatan dari barang sitaan negara adalah tanggung jawab dari Rupbasan karena benda sitaan negara tersebut merupakan bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan bukti ini akan menjadi salah satu pengambilan keputusan hukuman dalam persidangan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam mengelola Rupbasan, Rupbasan memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk berjalannya proses sistem peradilan pidana. Mulai dari keberadaan gedung yang sangat minim, keadaan gudang yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan pelaksana eksekusi yang terhambat sehingga mengakibatkan nilai ekonomis barang menyusut.

Permasalahan yang kompleks mengakibatkan tidak berjalannya Rupbasan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan dari Pemasyarakatan. Pengelolaan yang baik akan membuat perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang positif. Berkaitan dengan itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan menjadi langkah untuk kedepannya yang berupa :

1. Pembenahan dan pengadaan gedung dapat dilakukan secara continue serta diarahkan agar memiliki gedung yang permanen dan memiliki lahan sendiri untuk meningkatkan eksistensi Rupbasan dalam sistem peradilan pidana.
2. Renovasi dan pembuatan gudang sesuai standart agar fasilitas dari Rupbasan dapat dikatakan ideal dalam mengelola basan dan barang yang ada di Rupbasan.
3. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara perekrutan yang ketat serta bertahap sehingga Kementerian Hukum dan HAM terkhusus untuk Rupbasan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar dapat memenuhi tuntutan organisasi.

Perbaikan birokrasi terhadap Rupbasan sebagai salah satu penerima petikan putusan pengadilan agar benda sitaan negara dapat diketahui

keberadaannya. Dengan itu langkah pengelolaan benda sitaan negara dapat diambil lebih lanjut oleh pihak Rupbasan.

Bibliografi

- Anita, J., Aziz, N., & Yunus, M. (2013). Pengaruh Penempatan Dan Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Dampaknya Pada Prestasi Kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 11(1), 67–77.
- Ellitan, L. (2002). Praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 65–76.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229.
- Hardono, I., Nasrul, H. W., & Hartati, Y. (2019). Pengaruh Penempatan Dan Beban Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Pada Prestasi Kerja Pegawai. *Jurnal Dimensi*, 8(1), 28–43.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Jenderal, D. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Dalam Perspektif Pemulihan Aset yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPK tentang Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korups*. <https://docplayer.info/32312301-Kebijakan-pengelolaan-benda-sitaan-dan-barang-rampasan-negara-dalam-perspektif-pemulihan-aset.html>
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2019). Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalamrumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 4(1).
- Meutia, M. (2017). Proses Manjemen, Struktur Formal dan Penggunaan Informasi. *Jurnal Manajemen*, 21(1), 120–131.
- Pemasyarakatan, D. (2002). *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Sadarisman, S. D., Tasween, T., & Hasan, H. (2018). Eksistensi Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna Mendukung Perlindungan Hukum Pada Proses Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(1), 78–89.